

YOUNG PEOPLE AND THE SHADOW OF POPULISM: RECONSIDERING DEMOCRACY AND POLITICAL TRANSFORMATION IN INDONESIA

Alif Hasugian

Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada

hasugianalif@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas peran kaum muda di tengah lanskap politik kontemporer yang diwarnai populisme. Populisme merupakan suatu bentuk politik yang menekankan antagonisme antara rakyat versus elite. Sebagai kelompok yang paling aktif dalam mendukung demokrasi, kaum muda dapat mereproduksi maupun meresistensi narasi populis. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis pada studi kepustakaan dan analisa wacana kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muda memainkan peran ambivalen. Di satu sisi, populisme membuka ruang partisipasi politik dan ekspresi idealisme generasi muda; di sisi lain, ia berpotensi memperdalam polarisasi identitas dan melemahkan kualitas demokrasi. Penulis berargumen bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada arah idealisme politik kaum muda yang diarahkan pada wacana inklusif atau justru terjebak dalam antagonisme eksklusif.

kata kunci: *Populisme, Kaum Muda, Demokrasi, Transformasi Politik.*

Abstract

This paper examines the role of youth within the contemporary political landscape marked by populism. Populism is a form of politics that emphasizes the antagonism between the 'people' versus the 'elite'. As the group most actively supportive of democracy, youth can either reproduce or resist populist narratives. Employing a descriptive qualitative method based on literature review and critical discourse analysis, this study demonstrates that youth play an ambivalent role. On the one hand, populism opens up space for political participation and the expression of generational idealism; on the other hand, it has the potential to deepen identity polarization and weaken the quality of democracy. The author argues that the sustainability of Indonesian democracy is highly dependent on the direction of youth's political idealism whether it is channeled towards an inclusive discourse or becomes trapped in exclusive antagonism.

Keywords: *Populism, Youth, Democracy, Political Transformation.*

Article History: Received 21 October 2025, Revised 25 October 2025, Accepted 29 October 2025, Available online 30 October 2025

Pendahuluan

Populisme telah menjadi salah satu ciri menonjol dari politik kontemporer yang berkembang di berbagai belahan dunia. Gelombang populisme mengambil bentuk yang beragam. Mulai dari populisme kanan yang menekankan isu nasionalisme, proteksionisme, dan anti-imigrasi, hingga populisme kiri yang berorientasi pada keadilan sosial dan redistribusi ekonomi (Eatwell and Goodwin 2018). Secara konseptual, populisme dapat dipahami sebagai ideologi tipis (*thin-centered ideology*) yang menempatkan masyarakat dalam dikotomi moral antara “rakyat yang murni” dan “elite yang korup” (Mudde, C., & Rovira Kaltwasser 2017). Di kawasan Asia Tenggara, populisme muncul dalam bentuk politik kedekatan simbolik dengan rakyat dan penggunaan citra personalistik untuk membangun legitimasi (Pappas 2019); (Mounk 2018).

Kemunculan populisme tidak bisa dilepaskan dengan krisis representasi dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Krisis representasi terjadi ketika saluran politik formal, yaitu parlemen, partai politik, maupun birokrasi, dinilai gagal mewakili aspirasi warga (Taggart 2002). Populisme kemudian tampil sebagai alternatif yang mengklaim sebagai pembela rakyat dan menentang institusi yang dianggap korup atau jauh dari masyarakat. Norris dan Inglehart menyebut fenomena ini sebagai *cultural backlash* yang dipicu oleh rasa frustrasi masyarakat terhadap demokrasi liberal yang dipandang tidak responsif terhadap persoalan masyarakat (Norris, P., & Inglehart 2019). Di Indonesia, populisme ternyata malah digunakan sebagai strategi politik (Mietzner 2015). Di saat tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik maupun lembaga legislatif terus merosot, sebagaimana ditunjukkan berbagai survei nasional, kelompok oposisi menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan (Aspinall and Mietzner 2019).

Daya tarik populisme terletak pada kemampuannya memobilisasi sentiment publik terhadap status quo. Kluster masyarakat yang selama ini menjadi sasaran retorika populisme adalah petani dan kaum miskin perkotaan (Hadiz 2014). Mereka adalah kelompok sosial yang relatif tidak tersentuh kebijakan negara dan oleh karena itu tingkat kesejahteraannya jauh dibawah rata-rata penduduk. Selain dua kluster masyarakat itu, kaum muda juga rentan kehilangan harapan dan peluang untuk hidup lebih sejahtera. Menyempitnya akses terhadap pekerjaan layak membuat sebagian dari mereka menaruh kekecewaan terhadap para elit politik. Hal ini kemudian membuat kaum muda bersimpati dengan populisme (Amalia 2025). Kecenderungan sebagian kaum

muda yang mudah terpengaruh retorika populis ini cukup terlihat jelas pada saat kontestasi politik elektoral (Mietzner 2015).

Kaum muda telah lama dikenal dengan energi kolektif, semangat kritis, dan keterlibatan aktif dalam ruang publik, sehingga memiliki peran penting dalam arah perubahan politik (Feixa, C., Nilan, P., & Leccardi 2006). Sejarah politik Indonesia membuktikan kontribusi signifikan generasi muda, mulai dari gerakan mahasiswa 1966, 1974, hingga reformasi 1998. Deretan peristiwa politik tersebut menjadi penanda keterlibatan mereka dalam transisi politik dan demokratisasi (Aspinall and Mietzner 2019); (Dalton 2017). Peran ini menempatkan kaum muda dalam situasi ambivalen. Di satu sisi mereka memperkuat demokratisasi melalui partisipasi dan aktivisme politik. Namun di sisi lain kaum muda berpotensi melemahkannya ketika terjebak dalam arus politik yang eksklusif dan populistik (Dhakidae 2003).

Dinamika politik dalam dua dekade terakhir dapat dibaca sebagai tegangan antara populisme, kaum muda, dan demokrasi. Populisme memikat melalui narasi emosional dan simbolik; kaum muda menghadirkan potensi dan kerentanan terutama dalam ruang digital; sementara demokrasi diuji dalam menjaga kualitasnya di tengah tantangan ini. Ketiganya membentuk konfigurasi politik yang dinamis, dengan ruang digital berperan sebagai arena penting untuk produksi wacana, perluasan partisipasi, sekaligus sumber polarisasi (Tufekci 2017). Sebuah penelitian juga menemukan bahwa partai populis memang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi sering kali tidak diikuti dengan penguatan institusi demokrasi (Leininger and Meijers 2021).

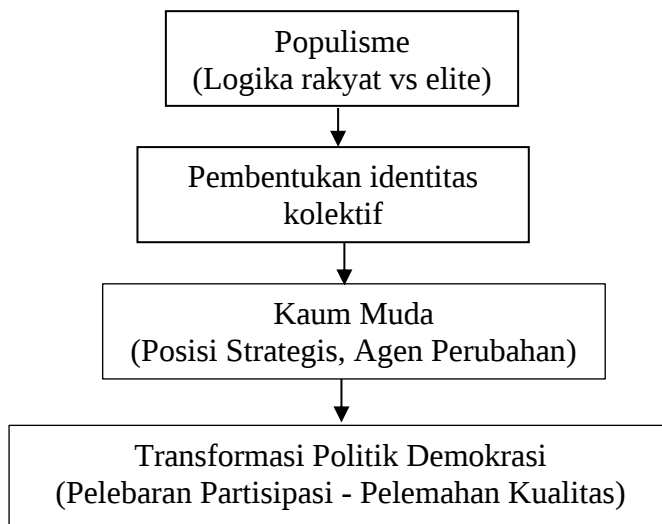
Dari dinamika tersebut lahir sejumlah pertanyaan bagaimana posisi kaum muda dalam pusaran populisme kontemporer yang menempatkan mereka antara ekspresi emosional dan komitmen demokratis; apa implikasi populisme terhadap kualitas demokrasi dalam kaitannya dengan keterlibatan generasi muda yang rentan terpolarisasi; serta bagaimana transformasi politik dapat dipahami melalui peran kaum muda yang sekaligus menjadi agen reproduksi maupun resistensi terhadap populisme.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini disusun dalam tiga bagian. Pertama, menjelaskan keterkaitan antara populisme, demokrasi, dan politik kaum muda sebagai fenomena yang saling terkait. Kedua, mengkritisi dampak populisme terhadap praktik politik generasi muda, termasuk peran media digital dalam membentuk preferensi politik mereka. Ketiga, menawarkan

analisis tentang arah transformasi politik di era menguatnya populisme dengan menyoroti keterlibatan kaum muda sebagai faktor kunci.

Secara teoretis, kajian ini bertumpu pada pemikiran Ernesto Laclau yang memandang populisme sebagai logika politik pembentukan identitas kolektif melalui oposisi rakyat versus elite, dengan menghubungkan berbagai tuntutan sosial dalam *chain of equivalence* sehingga menciptakan antagonisme sebagai dasar mobilisasi (Laclau 2005). Pemikiran ini diperluas oleh Laclau dan Mouffe melalui konsep hegemoni dan artikulasi wacana, yang menegaskan bahwa identitas politik terbentuk dalam proses diskursif (Laclau, E., & Mouffe 1985). Untuk memperjelas arah penelitian, peneliti merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Berpikir



Dalam kerangka ini, populisme bertumpu pada pembentukan identitas kolektif. Melalui konstruksi identitas ini berbagai tuntutan sosial dipersatukan ke dalam suatu *chain of equivalence* yang menghasilkan antagonisme sebagai dasar mobilisasi politik. Kaum muda diposisikan sebagai kelompok strategis yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Posisi ini menempatkan mereka dalam arus populisme, baik sebagai subjek yang dimobilisasi maupun sebagai aktor yang dapat melakukan resistensi. Dari keterlibatan kaum muda inilah kemudian muncul transformasi politik yang berimplikasi terhadap arah demokrasi. Transformasi tersebut dapat membuka peluang pelebaran partisipasi politik, tetapi sekaligus menyimpan risiko

pelemahan kualitas demokrasi apabila polarisasi dan antagonisme semakin menguat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami keterkaitan antara populisme, demokrasi, dan politik kaum muda dalam konteks kontemporer di Indonesia. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan eksplorasi terhadap konteks sosial secara menyeluruh sehingga sesuai untuk menelaah fenomena yang sarat dengan makna simbolik dan ideologis (Creswell 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan survei, dan dokumen digital yang relevan. Teknik ini dipandang sesuai karena isu populisme dan keterlibatan kaum muda dalam demokrasi telah banyak dikaji dalam literatur akademik yang otoritatif (Neuman 2014). Data kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis, yang menekankan pada pembacaan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Fairclough 2010). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana narasi populisme dibangun melalui oposisi rakyat dan elite serta bagaimana kaum muda ditempatkan dalam konstruksi wacana tersebut.

Populisme sebagai Logika Politik Kontemporer

Populisme kini menjadi ciri utama politik global maupun lokal. Beberapa figure politik global seperti Narendra Modi, Viktor Orban dan Donald Trump menggunakan populisme untuk memperoleh kekuasaan. Di Indonesia, tokoh politik nasional yang memanfaatkan narasi populis adalah Prabowo Subianto. Para figure politik tersebut paham bahwa populisme memiliki sifat yang lentur. Artinya ia dapat dilekatkan pada berbagai macam ideologi besar seperti liberalisme, sosialisme, maupun konservatisme (Mudde, C., & Rovira Kaltwasser 2017). Fleksibilitas ini membuat populisme mudah beradaptasi dengan konteks sosial-politik yang berbeda, sekaligus memberi ruang bagi pemimpin dan gerakan politik untuk memanfaatkannya demi memperluas basis dukungan.

Menguatkan populisme tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik di dalam masyarakat. Di saat optimisme politik memudar, populisme menawarkan narasi alternatif tentang pembelaan dan perubahan. Oleh karena itu, logika politik yang muncul adalah skema oposisi antara rakyat versus elite. Rakyat diposisikan sebagai entitas moral yang homogen, sedangkan elite dianggap sebagai aktor yang merusak kedaulatan rakyat (Laclau 2005). Pola antagonistik ini menjadi dasar mobilisasi, di mana pemimpin populis menampilkan diri

sebagai representasi langsung suara rakyat. Dengan demikian populisme merupakan bentuk reaksi sosial terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi demokrasi liberal. Rasa muak dan kecewa terhadap tatanan politik kemudian melahirkan fenomena *cultural backlash* (Norris, P., & Inglehart 2019). Rakyat kemudian menilai bahwa sistem representasi formal gagal menyalurkan aspirasi. Dalam situasi yang demikian, retorika populis memperoleh daya tarik karena menjanjikan pemulihan kedaulatan.

Di Indonesia, kondisi politik mengarah pada gejala yang sama, di mana survei menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Situasi ini membuka jalan bagi pemimpin populis untuk mengklaim legitimasi langsung dari rakyat tanpa perantara institusi formal (Aspinall and Mietzner 2019). Ada dua varian populisme yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah *ultra-populism* yang diusung oleh Prabowo Subianto. Varian ini menekankan pada gaya yang konfrontatif, berwatak nasionalis dan berorientasi pada figur 'penyelamat rakyat'. Yang terakhir adalah *technocratic populism*. Populisme ini disematkan pada figure Joko Widodo yang lebih inklusif, pragmatis, dan tidak anti-demokrasi (Mietzner 2015).

Munculnya figur populis dalam dinamika politik Indonesia kontemporer dapat dijelaskan sebagai epifenomena dari meningkatnya disfungsi sistemik, yang dipicu oleh kebosanan publik terhadap dominasi oligarki dan stagnasi demokrasi. Kemenangan Joko Widodo pada Pemilu 2014 menjadi penanda empiris bahwa populisme ini berakar pada krisis kepercayaan yang mendalam terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Para konstituen menaruh kepercayaan yang lebih pada figur kepemimpinan yang berasal dari luar lingkaran elit politik lama sebagai harapan untuk mencapai diskontinuitas elit dan representasi alternatif.

Joko Widodo termasuk figur populis karena menerapkan strategi pemosisian politik yang menekankan pada artikulasi kedekatan otentik dengan rakyat biasa, berbeda dengan populisme konfrontatif yang mengedepankan polarisasi "rakyat vs. elit" secara eksplisit. Karakter populis Jokowi dimanifestasikan melalui praktik "blusukan" yang berfungsi sebagai instrumen untuk memproyeksikan otentisitas dan membangun ikatan emosional, sekaligus memintas birokrasi tradisional (Hadut 2024). Selain itu, penggunaan citra non-elit dan penekanan kuat pada agenda pragmatis seperti pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik memperkuat persepsi bahwa ia adalah pemimpin yang lahir dari akar rumput dan berorientasi pada solusi-solusi teknokratis.

Meskipun populisme yang berkembang di Indonesia bersifat akomodatif dan menekankan pada pragmatisme, hal ini tidak meniadakan potensi sentralisasi kekuasaan dan potensi pelemahan institusi demokrasi. Otoritas politik sering digunakan untuk memajukan agenda pembangunan yang dianggap krusial, terutama ketika menghadapi kritik dari oposisi atau kelompok masyarakat sipil (Mietzner 2020). Dalam situasi ini, popularitas Presiden berfungsi sebagai legitimasi politik yang efektif untuk membenarkan tindakan-tindakan tersebut. Akibatnya, dinamika politik kontemporer di Indonesia cenderung memprioritaskan efektivitas teknokratis dan percepatan kebijakan, bahkan jika ini mengorbankan prinsip *check and balances* tradisional yang menjadi pilar demokrasi liberal.

Paradoks Populisme: Memperkuat atau Melemahkan Demokrasi

Populisme menghadirkan paradoks yang mendasar bagi demokrasi. Di satu sisi, populisme menjadi kekuatan politik yang mampu membuka pintu partisipasi lebih luas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya apatis atau terpinggirkan. Kehadiran partai dan pemimpin populis sering kali berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat, termasuk kaum muda, melalui retorika politik yang sederhana, emosional, serta langsung menyentuh pengalaman sehari-hari rakyat (Leininger and Meijers 2021). Retorika ini membuat populisme tampak lebih dekat dengan kehidupan rakyat, sehingga memunculkan partisipasi politik yang lebih tinggi dalam proses elektoral. Dalam kerangka ini, populisme dipandang memiliki fungsi inklusif dengan memberi ruang bagi kelompok yang selama ini berada di pinggiran sistem politik formal.

Namun, perluasan partisipasi tersebut tidak selalu diiringi oleh penguatan institusi demokrasi. Haboddin menunjukkan bahwa pemimpin populis kerap berupaya memusatkan kekuasaan atas nama rakyat (Haboddin 2019). Strategi ini mengaburkan prinsip *checks and balances* yang menjadi pilar demokrasi, karena klaim legitimasi langsung dari rakyat sering dipakai untuk menegasikan peran lembaga perwakilan. Kondisi tersebut melahirkan dilema, yaitu demokrasi menjadi lebih partisipatif sekaligus rapuh dalam menjaga keseimbangan institusional dan keberagaman politik. Hadut menggambarkan fenomena ini sebagai paradoks populisme, di mana pelebaran akses partisipasi politik berlangsung bersamaan dengan penurunan kualitas demokrasi (Hadut 2024).

Paradoks tersebut terlihat jelas dalam sejumlah pengalaman global. Mounk menjelaskan bahwa pemimpin populis sering menggunakan legitimasi elektoral untuk melemahkan norma-norma demokratis, sehingga partisipasi rakyat

justru dijadikan alat konsolidasi kekuasaan (Mounk 2018). Di Eropa Timur, pengalaman Hungaria dan Polandia memperlihatkan bagaimana partai populis mampu mempertahankan partisipasi elektoral tinggi, tetapi dalam waktu bersamaan melakukan reformasi yang melemahkan independensi yudikatif dan media (Berman 2017). Hal yang sama juga terlihat di Amerika Latin, di mana populisme sering memobilisasi rakyat dengan agenda redistribusi sosial, namun berujung pada konsentrasi kekuasaan di tangan pemimpin yang mengklaim diri sebagai representasi tunggal rakyat (Levitsky, S., & Roberts 2011)

Paradoks ini menegaskan bahwa populisme tidak hanya menghadirkan energi baru bagi demokrasi, melainkan juga risiko terhadap substansinya. Demokrasi partisipatoris dapat meluas, namun kualitas demokrasi deliberatif yang menjamin pluralisme, keberagaman, dan akuntabilitas institusi berpotensi mengalami kemunduran. Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa populisme dan demokrasi berada dalam hubungan yang kompleks: saling memperkuat dari sisi partisipasi, tetapi juga berpotensi saling melemahkan dari sisi institusionalisasi.

Posisi Kaum Muda

Kaum muda memiliki posisi yang sangat strategis dalam lanskap politik kontemporer. Dari sisi demografi, proporsi mereka cukup signifikan dalam struktur penduduk. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari 25 persen populasi Indonesia terdiri dari kelompok usia muda. Hal ini menjadikannya kaum muda sebagai kekuatan demografis yang berpotensi mengarahkan dinamika politik nasional (BPS 2018). Angka ini juga mencerminkan kapasitas kaum muda untuk memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan maupun formasi kepemimpinan politik di tingkat nasional.

Energi kolektif, idealisme, serta semangat progresif menjadikan generasi muda kerap dipandang sebagai kelompok yang mampu memperluas partisipasi demokratis. Dalam konteks partisipasi politik, mereka tidak hanya hadir sebagai pemilih, melainkan juga sebagai aktor yang aktif dalam mengartikulasikan isu sosial-politik melalui gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga mobilisasi di ruang publik. Penelitian Norris menekankan bahwa generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap perubahan politik, sehingga memiliki kapasitas untuk mendorong demokratisasi yang lebih partisipatif (Norris, P., & Inglehart 2019).

Dhakidae menekankan bahwa generasi muda sering kali berada dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan, sehingga energi progresif mereka berpotensi diarahkan untuk kepentingan elite tertentu (Dhakidae 2003). Dalton menambahkan bahwa keterlibatan politik generasi muda dipengaruhi oleh faktor status sosial, akses informasi, dan orientasi nilai, yang membuat pola partisipasi mereka beragam dan penuh kompleksitas (Dalton 2017). Dalam konteks global, Henn dan Foard menunjukkan bahwa meskipun generasi muda memiliki semangat politik yang kuat, keterlibatan mereka sering diekspresikan melalui bentuk partisipasi non-konvensional, seperti aksi kolektif, protes jalanan, atau kampanye berbasis isu tertentu (Henn and Foard 2014). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola partisipasi dari bentuk institusional menuju bentuk yang lebih fleksibel dan berbasis pada identitas kolektif.

Ambivalensi posisi kaum muda juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam narasi populis. Taggart menegaskan bahwa populisme memiliki daya tarik emosional yang kuat (Taggart 2000). Sehingga generasi muda dengan idealisme dan semangat progresifnya rentan dimobilisasi untuk memperkuat retorika oposisi rakyat versus elite. Dalam konteks Eropa, mengalami ketidakpuasan terhadap institusi politik mendorong generasi muda mencari alternatif representasi melalui partai atau gerakan populis (Norris, P., & Inglehart 2019). Hal yang sama terlihat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana generasi muda dapat menjadi basis dukungan populis melalui artikulasi isu moralitas, agama, dan nasionalisme (Mietzner 2015).

Salah satu ciri khas populisme di Indonesia ialah penggunaan isu identitas sebagai basis mobilisasi politik. Populisme sering menekankan agama, moralitas, dan nasionalisme sebagai fondasi wacana politik, terutama dalam kontestasi elektoral yang membutuhkan dukungan massa luas (Mietzner 2015). Daya tarik isu-isu tersebut bersifat emosional sekaligus simbolik, sehingga mampu memobilisasi dukungan dengan cepat. Dalam konteks kaum muda, isu identitas memperoleh resonansi yang lebih kuat karena mereka memiliki idealisme yang kerap berkelindan dengan moralitas publik dan identitas kelompok. Idealisme ini memberi legitimasi pada keterlibatan politik mereka, namun juga menghadirkan kerentanan terhadap eksploitasi isu-isu eksklusif oleh elite populis.

Polarisasi politik yang berbasis identitas semakin menajam seiring meningkatnya kontestasi politik di Indonesia. Generasi muda, dengan karakter partisipasi politik yang cenderung ekspresif, lebih mudah terseret dalam wacana antagonistik yang menekankan dikotomi antara kelompok mayoritas

dan minoritas. Hal ini terlihat, misalnya, dalam kontestasi elektoral di tingkat nasional dan lokal, di mana narasi keagamaan digunakan untuk memperkuat dukungan massa. Generasi muda menjadi agen penting dalam memperluas basis politik identitas sekaligus dalam mempertajam polarisasi.

Implikasi polarisasi identitas terhadap demokrasi sangat kompleks. Inayatul menekankan bahwa polarisasi berbasis identitas dapat melemahkan kerukunan sosial, mempersempit ruang dialog antar kelompok, serta memperkuat eksklusivitas politik (Inayatul, Andi, and Hasyim 2024). Dalam konteks generasi muda, situasi ini berpotensi mengubah energi politik progresif mereka menjadi instrumen penguatan narasi eksklusif yang membatasi ruang pluralisme. Penelitian McCoy dan Somer mengenai polarisasi di berbagai negara menunjukkan bahwa politik identitas yang dilekatkan pada populisme sering kali menimbulkan keterbelahan sosial yang mendalam, sehingga menurunkan kualitas deliberasi publik (McCoy and Somer 2019). Dengan demikian, kaum muda dapat berperan ganda: di satu sisi menjadi motor penguatan demokrasi berbasis moralitas dan keadilan, di sisi lain memperdalam fragmentasi sosial melalui mobilisasi identitas yang eksklusif.

Polarisasi yang melibatkan kaum muda juga berkaitan erat dengan pergeseran bentuk partisipasi politik di era kontemporer. Mudde menegaskan bahwa populisme mampu mengartikulasikan tuntutan identitas secara sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh kelompok muda yang tengah mencari identitas politik (Mudde, C., & Rovira Kaltwasser 2017). Di Eropa, keterlibatan generasi muda dalam gerakan populis kanan sering berhubungan dengan isu nasionalisme dan anti-imigrasi (Norris, P., & Inglehart 2019). Sementara itu, di Amerika Latin, populisme kiri justru menarik kaum muda dengan agenda redistribusi ekonomi dan keadilan sosial (Panizza 2005). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keterlibatan kaum muda dalam politik identitas dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis masing-masing negara, namun pola polarisasi yang muncul sering kali memiliki kesamaan, yaitu keterbelahan yang berbasis pada perasaan memiliki atau kehilangan identitas kolektif.

Dalam konteks Indonesia, polarisasi identitas semakin intensif karena isu agama memiliki daya tarik politik yang sangat kuat. Generasi muda yang aktif di organisasi keagamaan, kampus, dan komunitas sosial sering kali menjadi target mobilisasi wacana populis berbasis agama. Fenomena ini menegaskan bahwa keterlibatan kaum muda dalam politik identitas memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan demokrasi. Mereka dapat menjadi agen yang

memperluas ruang demokrasi dengan mengartikulasikan nilai moralitas dan keadilan, namun mereka juga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial apabila isu identitas dijadikan alat eksklusivitas politik.

Kaum Muda sebagai Agen Reproduksi dan Resistensi

Kaum muda memiliki potensi besar untuk memainkan peran ganda dalam lanskap politik kontemporer, yaitu sebagai agen reproduksi wacana populis maupun sebagai agen resistensi terhadapnya. Dalam kapasitas reproduktif, generasi muda dapat memperkuat antagonisme rakyat versus elite dengan menginternalisasi retorika populis yang mengedepankan eksklusivitas identitas. Retorika tersebut memiliki daya tarik kuat karena kesederhanaannya dalam membagi realitas politik ke dalam dua kutub yang berseberangan. Generasi muda dengan energi mobilisasi yang tinggi dapat menjadi penguat utama retorika populis, baik melalui aksi kolektif di jalanan, organisasi mahasiswa, maupun kampanye di media sosial. Penelitian Tufekci menekankan bahwa media digital telah memperluas kemampuan generasi muda dalam memproduksi dan menyebarkan narasi politik, sehingga mempercepat reproduksi wacana populis dalam ruang publik (Tufekci 2017).

Namun, dalam kapasitas resistensi, kaum muda juga memiliki potensi besar untuk mengartikulasikan wacana demokratis yang inklusif. Feixa, Dkk. Menunjukkan bahwa identitas generasi muda bersifat hibrid, cair, dan terbuka, yang memungkinkan mereka membangun ruang perlawanan terhadap narasi politik yang eksklusif (Feixa, C., Nilan, P., & Leccardi 2006). Identitas *hibrid* ini mencerminkan kemampuan generasi muda untuk menggabungkan berbagai nilai global dan lokal dalam satu kerangka ekspresi politik, sehingga memperbesar peluang untuk melahirkan gerakan yang lebih pluralis. Noack menambahkan bahwa tingkat literasi politik, orientasi nilai, dan pengalaman historis keterlibatan sosial-politik sangat menentukan arah partisipasi generasi muda (Noack and Eckstein 2023). Faktor-faktor tersebut menjadi filter penting apakah mereka akan mereproduksi narasi populis atau justru mengartikulasikan resistensi terhadapnya.

Dalam konteks Indonesia, posisi ganda generasi muda terlihat dalam berbagai fenomena politik mutakhir. Sebagian kelompok muda terlibat dalam mobilisasi berbasis identitas, misalnya melalui dukungan terhadap gerakan politik yang menekankan agama sebagai fondasi utama solidaritas politik. Fenomena ini memperlihatkan kapasitas reproduktif generasi muda dalam memperkuat antagonisme rakyat versus elite dengan basis moralitas dan

religiusitas. Aspinall mencatat bahwa gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Indonesia sering kali bergerak dalam spektrum yang luas, mulai dari mendukung narasi eksklusif hingga memperjuangkan agenda demokratisasi (Aspinall and Mietzner 2019). Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi pendukung utama wacana populis yang eksklusif ketika aspirasi politik mereka disalurkan melalui isu-isu identitas.

Sebaliknya, generasi muda Indonesia juga menunjukkan kapasitas resistensi. Aksi mahasiswa pada 2019 yang menentang sejumlah revisi undang-undang yang dianggap mengancam demokrasi memperlihatkan peran mereka sebagai agen resistensi terhadap wacana politik yang dianggap melemahkan kebebasan sipil. Dalam kasus ini, kaum muda berperan sebagai motor penggerak gerakan sosial yang berlandaskan pada idealisme demokratis dan nilai keadilan sosial. Keterlibatan mereka memperlihatkan bagaimana energi politik generasi muda dapat diarahkan pada perlawanan terhadap eksklusivitas populis dan pelemahan demokrasi.

Keterlibatan generasi muda Indonesia dalam reproduksi maupun resistensi populisme juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Sosial media menjadi arena penting bagi generasi muda untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Penelitian Lim menunjukkan bahwa media digital di Indonesia berfungsi ganda sebagai ruang mobilisasi populis sekaligus arena resistensi politik (Lim 2017). Generasi muda aktif menggunakan media sosial untuk memperkuat identitas kelompok, namun juga untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau elite politik. Dengan demikian, media digital menjadi sarana utama yang mempertegas posisi ambivalen generasi muda: sebagai agen reproduksi dan sekaligus agen resistensi.

Ambivalensi ini menegaskan bahwa generasi muda di Indonesia memiliki peran krusial dalam menentukan arah perkembangan populisme. Kapasitas reproduktif mereka memperkuat basis legitimasi politik populis, sementara kapasitas resistif mereka menghadirkan peluang bagi demokrasi yang lebih inklusif. Faktor penentu yang memengaruhi arah tersebut antara lain literasi politik, kualitas pendidikan, akses terhadap informasi, serta pengalaman historis dalam gerakan sosial. Relasi antara populisme dan generasi muda di Indonesia dengan demikian tidak hanya bersifat reproduktif, tetapi juga transformatif, karena peran mereka berpotensi mengubah arah demokrasi kontemporer melalui resistensi terhadap eksklusivitas populis.

Sintesis Transformasi Politik Demokrasi

Interaksi antara populisme, kaum muda, dan demokrasi menghasilkan konfigurasi politik yang bersifat ambivalen. Populisme menghadirkan energi baru bagi partisipasi politik, khususnya melalui retorika sederhana yang menekankan kedekatan dengan rakyat. Sementara itu, kaum muda muncul sebagai aktor utama yang menentukan arah transformasi politik, sebab keterlibatan mereka sangat dipengaruhi oleh idealisme, energi kolektif, dan pengalaman historis dalam pergerakan sosial. Arah transformasi demokrasi sangat bergantung pada bagaimana generasi muda menyalurkan idealisme tersebut: apakah menuju pada wacana inklusif yang memperluas ruang partisipasi atau pada antagonisme eksklusif yang memperdalam polarisasi sosial.

Dalam kerangka teori Ernesto Laclau, populisme dipahami sebagai logika politik yang membangun identitas kolektif melalui *chain of equivalence*, yakni proses penyatuan tuntutan sosial yang berbeda ke dalam satu oposisi rakyat versus elite (Laclau, E., & Mouffe 1985). Dalam proses ini, kaum muda dapat dipahami sebagai titik artikulasi yang menghubungkan berbagai aspirasi sosial, mulai dari isu keadilan, demokratisasi, hingga identitas moral dan religius. Posisi strategis ini memberi mereka peran sebagai penentu apakah populisme di Indonesia berkembang ke arah perluasan demokrasi partisipatoris atau justru memperkuat eksklusivitas politik.

Dalam konteks Indonesia, transformasi politik demokrasi yang melibatkan kaum muda dapat diamati dalam dua arah. Pertama, sebagai motor partisipasi, kaum muda sering memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan aspirasi politik, baik melalui kampanye, aksi solidaritas, maupun mobilisasi protes. Lim menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia menjadi arena penting bagi generasi muda untuk mengartikulasikan isu-isu politik, sekaligus memperluas ruang partisipasi publik (Lim 2017). Fenomena seperti gerakan #ReformasiDikorupsi pada 2019 memperlihatkan bagaimana kaum muda mampu memanfaatkan ruang digital untuk mendorong resistensi terhadap kebijakan yang dinilai mengancam demokrasi.

Kedua, dalam kapasitas reproduktif, kaum muda juga dapat memperkuat polarisasi identitas yang melekat pada populisme. Dalam sejumlah kontestasi elektoral, isu agama dan moralitas sering kali dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan dukungan, dan generasi muda menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam menyebarkan narasi tersebut melalui jaringan digital maupun komunitas sosial (Wahyuningroem et al. 2024). Dengan demikian,

kaum muda memiliki potensi untuk memperkuat politik eksklusif apabila idealisme mereka disalurkan melalui retorika populis yang berbasis antagonisme.

Ambivalensi peran generasi muda dalam demokrasi kontemporer Indonesia juga berkaitan dengan pengalaman historis gerakan mahasiswa. Pada reformasi 1998, mahasiswa menjadi kekuatan resistensi yang membuka jalan bagi transisi demokrasi (Aspinall and Mietzner 2019). Namun, pada periode setelahnya, sebagian organisasi kepemudaan terkooptasi oleh kepentingan elite politik, sehingga memperlihatkan bagaimana posisi mereka dapat berubah dari agen progresif menjadi instrumen kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi politik demokrasi di Indonesia berada pada persimpangan yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana kaum muda memilih untuk mengartikulasikan wacana politiknya.

Konfigurasi ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara populisme, kaum muda, dan demokrasi. Kaum muda dapat memperluas partisipasi politik melalui artikulasi wacana inklusif, namun juga dapat memperdalam eksklusivitas politik melalui keterlibatan dalam narasi antagonistik. Relasi ini menempatkan mereka sebagai aktor strategis dalam transformasi demokrasi Indonesia, yang mampu membentuk identitas kolektif baru melalui penghubungan tuntutan sosial yang beragam. Dalam kerangka ini, demokrasi Indonesia berada dalam dinamika yang sangat bergantung pada orientasi kaum muda: apakah menjadi kekuatan yang memperluas partisipasi inklusif atau menjadi instrumen penguatan populisme eksklusif.

Kesimpulan

Kajian ini menemukan bahwa populisme, kaum muda, dan demokrasi membentuk relasi yang saling berkelindan dalam politik kontemporer. Populisme hadir sebagai strategi politik yang memanfaatkan oposisi rakyat versus elite untuk memperoleh legitimasi, sementara kaum muda dengan energi kolektif dan idealismenya menempati posisi strategis sebagai agen reproduksi maupun resistensi terhadap wacana populis. Di satu sisi, populisme mendorong keterlibatan kaum muda melalui perluasan partisipasi politik, khususnya di ruang digital. Namun, di sisi lain, keterlibatan ini juga berpotensi menimbulkan polarisasi identitas yang melemahkan kualitas demokrasi deliberatif. Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa arah demokrasi Indonesia sangat bergantung pada bagaimana generasi muda mengartikulasikan idealisme

politiknya: apakah menuju wacana inklusif yang memperkuat pluralisme, atau terjebak dalam antagonisme eksklusif yang membatasi ruang demokrasi.

Secara sosial-politik, penelitian ini membuka ruang refleksi kolektif tentang masa depan demokrasi yang tengah menghadapi tantangan populisme. Adapun saran dari penelitian ini, generasi muda memiliki keharusan meningkatkan literasi politik guna mengembangkan sikap kritis dan inklusif dalam menanggapi narasi populis. Institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan perlu memperkuat ruang dialog yang demokratis, sementara pembuat kebijakan diharapkan merancang mekanisme partisipasi politik yang transparan dan responsif. Dengan langkah-langkah tersebut, ruang politik kaum muda dapat diarahkan pada penguatan demokrasi substantif di tengah tantangan populisme.

Daftar Pustaka

- Amalia, Indira Fikri. 2025. "Competing Hegemonic Projects: Populism, Youth and Politics in Indonesia's 2024 Presidential Election."
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. 2019. "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55(3): 295–317. doi:10.1080/00074918.2019.1690412.
- Berman, Sheri. 2017. "Populism Is a Symptom Rather than a Cause: Democratic Disconnect, the Decline of the Center-Left, and the Rise of Populism in Western Europe." *The University of Chicago Press Journal* 49(4): 443–48.
- BPS. 2018. "Data Kemiskinan Indonesia 1970–2018 Dalam Kompas. "Membandingkan Angka Kemiskinan Dari Era Soeharto Hingga Jokowi."
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dalton, R. J. 2017. *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.
- Dhakidae, D. 2003. *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Eatwell, Roger, and Matthew Goodwin. 2018. *National Populism: The Revolt against Liberal Democracy*. Penguin UK.
- Fairclough, N. 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.

- Feixa, C., Nilan, P., & Leccardi, C. 2006. *Global Youth? Hybrid Identities, Plural World*. Routledge.
- Haboddin, Muhtar. 2019. "Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 1(2): 173. doi:10.33474/jisop.v1i2.4802.
- Hadiz, Vedi R. 2014. "A New Islamic Populism and the Contradictions of Development." *Journal of Contemporary Asia* 44(1): 125–43.
- Hadut, Aventinus Darmawan. 2024. "Kepemimpinan Populisme Jokowi Dan Pengaruhnya Terhadap Degradasi Kualitas Demokrasi." *Jurnal Akademika* 24(1): 36–47.
- Henn, Matt, and Nick Foard. 2014. "Social Differentiation in Young People's Political Participation: The Impact of Social and Educational Factors on Youth Political Engagement in Britain." *Journal of Youth Studies* 17(3): 360–80. doi:10.1080/13676261.2013.830704.
- Inayatul, Mutmainnah, Aderus Andi, and Jusniati Hasyim. 2024. "Islam Dan Politik Identitas: Suatu Keharusan Atau Pencegahan." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 7(1): 1–9.
- Laclau, E. 2005. *On Populist Reason*. London: Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Leininger, Arndt, and Maurits J. Meijers. 2021. "Do Populist Parties Increase Voter Turnout? Evidence From Over 40 Years of Electoral History in 31 European Democracies." *Political Studies* 69(3): 665–85. doi:10.1177/0032321720923257.
- Levitsky, S., & Roberts, K. M. 2011. *The Resurgence of the Latin American Left*. Johns Hopkins University Press.
- Lim, M. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49(3): 411–27.
- McCoy, Jennifer, and Murat Somer. 2019. "Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 681(1): 234–71. doi:10.1177/0002716218818782.

- Mietzner, Marcus. 2015. *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Mietzner, Marcus. 2020. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39(2): 227–49.
- Mounk, Y. 2018. *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.
- Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. 2017. *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Noack, Peter, and Katharina Eckstein. 2023. "Populism in Youth: Do Experiences in School Matter?" *Child Development Perspectives* 17(2): 90–96. doi:10.1111/cdep.12481.
- Norris, P., & Inglehart, R. 2019. *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Panizza, F. 2005. *Populism and the Mirror of Democracy*. Verso.
- Pappas, Takis S. 2019. *Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis*. Oxford University Press.
- ROODUIJN, MATTHIJS. 2019. "State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus." *European Consortium for Political Research* 58(1): 362–72.
- Taggart. 2000. *Populism*. Buckingham: Open University Press.
- Taggart, Paul. 2002. "Populism and the Pathology of Representative Politics." In *Democracies and the Populist Challenge*, Springer, 62–80.
- Tufekci, Z. 2017. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
- Wahyuningroem, Sri Lestari, Rheinhard Sirait, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, and Dudy Heryadi. 2024. "Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw." *F1000Research* 12(May): 1–25. doi:10.12688/f1000research.122669.3.